

**PEMEKARAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
DI KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU (STUDI
KASUS PEMV BANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA TANJUNG
TAHUN 2010-2013**

Oleh:
Rahmad Mel
(Rahmadmel@yahoo.co.id)
Drs. M. Y. Tiyas Tinov, M.Si

*Jurusa ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrtantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru
28293- Telp/Fax. 0761-63277*

ABSTRACT

Subdistrict Koto Kampar Hulu by the Regional Regulation No. 2 of 2010, this district is a division of the District XIII Koto Kampar, the purpose of this division course to accelerate development in the region. Special Desa Tanjung, which is the Capital District 's construction Hulu Koto Kampar more because of the facilities are located in rural districts such as, Head Office, Health Center, and the Grand Mosque . However, after 3 years of the status of the district, sub-district capital city is still a village, and based on observations while writer, infrastructure development in the Desa Tanjung as the Capital District is still lagging behind when compared to other districts with the capital.

The purpose of this study was to determine the development of infrastructure in the Desa Tanjung after splitting districts Koto Kampar Hulu years 2010-2013 and to know Factors Affecting the Development of infrastructure in the village of Koto Kampar District of the Upper Cape 2010-2013. Theory (approach) is used as an analytical tool in this study is the theory of Development and Proliferation. While the methods used in this research is descriptive qualitative research that is intended to provide a systematic overview of the observed phenomena.

Based on these results , the District Redistricting no significant impact for Infrastructure Development in the Desa Tanjung, especially road infrastructure development has not changed (still broken since pre-expansion), yet the addition of clean water infrastructure to offset the increase in the consumption of the population, the absence of additional power lines entrance to the village since before the expansion, as well as the people who abandoned the market in the wake of the destruction of the access road to the site . Meanwhile, factors affecting the unavailability of infrastructure in the village of Tanjung after splitting districts, in other words, the expansion does not affect the development of infrastructure, among others, lack of government initiative in managing the affairs of the village households, lack Revenue Village (PADes), and Redistricting which tend to be forced.

Keywords: Impact, Expansion, District, Desa Tanjung.

LATAR BELAKANG MASALAH

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang wilayahnya sangat luas, Kabupaten ini telah berpengalaman tentang implementasi penyelenggaraan otonomi daerah sejak bergulirnya reformasi, tetapi langkah-langkah dalam semangat otonomi daerah dan mengakomodasi berbagai tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan dalam mewujudkan pembangunan, maka pada tahun 2010 diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010, sebagai pembaharuan

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Bangkinang Seberang, Salo, Kampar Utara, Rumbio Jaya, Kampar Timur, Kampar Kiri Tengah, Gunung Sahilan, Perhentian Raja dan Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Khusus pada Kecamatan Koto Kampar Hulu, merupakan pemekaran dari Kecamatan XIII Koto Kampar, tujuan pemekaran ini tentu saja untuk mempercepat pembangunan di wilayah ini. Berikut adalah nama-nama desa setelah pemekaran di Kecamatan Koto Kampar Hulu:

Tabel I.1
Nama-Nama Desa Setelah Pemekaran
di Kecamatan Koto Kampar Hulu

No	Nama-nama Desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu
1	Desa Tanjung
2	Desa Tabing
3	Desa Pongkai
4	Desa Gunung Malelo
5	Desa Sibiruang
6	Desa Bandur Picak

Sumber: Kantor Camat Koto Kampar Hulu tahun 2013

Mengenai infrastruktur di kecamatan ini setelah adanya pemekaraan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2
Kondisi Kantor Desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu

No	Kantor Desa	Kondisi
1	Desa Tanjung	Cukup Baik
2	Desa Tabing	Rusak, direnovasi tahun 2006
3	Desa Pongkai	Rusak
4	Desa Gunung Malelo	Rusak Ringan
5	Desa Sibiruang	Rusak
6	Desa Bandur Picak	Rusak berat

Sumber: Kantor Camat Koto Kampar Hulu tahun 2013

Khusus Desa Tanjung, yang merupakan Ibukota Kecamatan Koto Kampar Hulu ini pembangunannya lebih banyak karena adanya fasilitas kecamatan yang ditempatkan di desa

ini seperti, Kantor Camat, Puskesmas, dan Masjid Raya. Berikut ini adalah gambaran pembangunan gedung fasilitas kecamatan yang ada di Desa Tanjung.

Tabel 1.3
Pembangunan Fasilitas Infrastruktur di Desa Tanjung

No	Infrastruktur	Jumlah	Kondisi
1	Jalan Lingkungan	1	Rusak
2	Sarana Air Bersih	2	Rusak
3	Jaringan Listrik (PLN)	-	Masih 50% Teraliri
5	Pasar	1	Rusak

Sumber: Kantor Camat Koto Kampar Hulu tahun 2013

Kedua tabel di atas menggambarkan bahwa kondisi infrastruktur di Kecamatan Koto Kampar Hulu setelah pemekaran masih memprihatinkan. Kantor Kepala Desa yang seharusnya menjadi pusat pelayanan administrasi tiap desa kondisinya justru tidak layak pakai, dari 6 (enam) Kantor Kepala Desa, hanya Kantor Kepala Desa Tanjung yang layak untuk digunakan. Demikian juga kondisi infratraktur

yang dibangun di Desa Tanjung sebagai Ibukota Kecamatan. Sebagai penunjang aktifitas masyarakat, jalan lingkungan kondisinya rusak, hanya sekita 1,5 km saja yang kondisi aspalnya baik. Begitu juga halnya dengan sarana air bersih yang kondisinya rusak%.

Sebagai perbandingan, Berikut ini adalah perbandingan fasilitas Desa Tanjung dengan Desa Tabing:

Tabel 1.4
Pembangunan Infrastruktur di Desa Tabing

No	Bangunan/Gedung	Jumlah	Kondisi
1	Jalan Lingkungan	4 KM	Baik
2	Sarana Air Bersih	2	Baik
3	Jaringan Listrik (PLN)	-	Sudah 80% Teraliri
5	Pasar	1	baik

Sumber: Kantor Camat Koto Kampar Hulu tahun 2013

Keadaan di Desa Tanjung juga tidak berbeda dengan kondisi di Desa Tabing, ini dinilai wajar karena di Desa Tanjung yang merupakan Ibukota Kecamatan saja kondisi gedung banyak yang rusak apalagi di

desa-desa sekitarnya. Jadi permasalahannya secara umum adalah fasilitas gedung di Kecamatan Koto Kampar Hulu sebagian besar mengalami kerusakan.

Sejalan dengan kondisi pembangunan infrastruktur yang masih belum maksimal, masyarakat Desa Tanjung juga mengeluhkan kondisi tersebut, berikut hasil pra

survei penulis kepada sejumlah warga mengenai tanggapannya terhadap infrastruktur di kecamatan ini.

Tabel 1.5
Jenis Keluhan Warga terhadap Infrastruktur di Desa Tanjung

No	Jenis Keluhan Warga
1	Jalan banyak yang rusak
2	Fasilitas air bersih tidak berfungsi lagi
3	Masalah penerangan, terutama jaringan listrik
5	Jembatan juga banyak yang rusak
6	Sarana kegiatan kepemudaan tidak ada

Sumber: Pra survei tahun 2013

Setelah 3 tahun berstatus kecamatan, Ibukota kecamatan ini masih berstatus desa, dan berdasarkan pengamatan sementara penulis, pembangunan infrastruktur di Desa Tanjung sebagai Ibukota Kecamatan masih tertinggal jika dibanding dengan Ibukota kecamatan lainnya. Pihak-pihak terkait dalam masalah ini, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sampai sejauh ini belum tugas sebagaimana seharusnya. Seharusnya dengan berdirinya kecamatan ini, maka kondisi infrastruktur telah membaik, terutama menyikut:

1. Ketersediaan jalan yang memadai (infrastruktur transportasi)
2. Ketersediaan sarana air bersih (infrastruktur kesehatan)
3. Ketersediaan jaringan listrik (infrastruktur teknologi)
4. Ketersediaan pusat perdagangan (infrastruktur ekonomi)

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Setelah Pemekaran Tahun 2010-2013?

Konsep Teoritis

1. Konsep Pembangunan

Perkembangan paradigma pembangunan dimulai sejak istilah pembangunan (*development*) mulai dikenalkan oleh Amerika Serikat pada tahun 1947, bersamaan dengan itu politik *Marshall Plan* hadir untuk mengalahkan Ideologi Komunis dari Uni Soviet dalam perang dingin. Sekitar tahun 1950-an Paradigma

Teori Modernisasi muncul untuk mendukung Marshall Plan menancapkan kapitalisme di negara dunia ketiga. Memasuki tahun 1960-an paradigma tersebut dikritik oleh Paradigma Teori Ketergantungan. Pada tahun 1970-an, dialektika paradigma teori di atas menghasilkan Paradigma Teori Sistem Dunia. Sejak tahun 1980-an paradigma pembangunan terus-menerus dimaknai ulang, dikritik, disempurnakan, dan dibuat konsep tandingannya (anti tesis) hingga saat ini menghasilkan paradigma yang lebih radikal seperti Pasca Pembangunan.

Paradigma modernisasi dalam keilmuan sebenarnya lahir dari Teori Evolusi yang digagas oleh Darwin. Oleh karena itu dalam Paradigma Teori Modernisasi, pengertian pembangunan (*development*) disamakan dengan evolusi (*evolution*), artinya masyarakat yang disebut mengalami modernisasi adalah masyarakat yang berkembang dari kesederhanaan (tradisional) menjadi terdiferensiasi dan kompleks dalam aspek kehidupannya (Suwarsono dan So, 1990). Konsep modernisasi menekankan pada pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) untuk mensejahterkan seluruh lapisan masyarakat, melalui pemerataan (*trickle down effect*).

Menurut Budiman (1996: 29) beberapa teori yang termasuk dalam paradigma ini diantaranya: 1) Teori Harrod-Domar tentang Tabungan dan Investasi; 2) Teori Max Weber tentang Etika Protestan; 3) Teori McClelland tentang Dorongan Berprestasi (*achievement*); 4) Teori Rostow tentang Lima Tahap Pembangunan; 5) Teori Bert F.

Hoselitz tentang Faktor-Faktor Non-Ekonomi (Pengembangan Teori Lima Tahap Pembangunan Rostow); dan 6) Teori Inkeles dan Smith tentang Manusia Modern. Setelah tiga dasawarsa, pembangunan (pertumbuhan ekonomi dan modernisasi) mulai menunjukkan kegagalannya.

Kegagalan itu dijadikan senjata oleh Cardoso (1980) dan Frank (1994) untuk mengkritik bahwa pembangunan melalui modernisasi menyebabkan ketergantungan Negara Dunia Ketiga terhadap Negara Maju. Konsep *trickle down effect* ternyata tidak berjalan dan kesejahteraan tidak merata. Kemiskinan dan keterbelakangan yang terdapat di negara-negara dunia ketiga yang mengkhususkan diri pada produk pertanian (tradisional) dipandang sebagai akibat dari struktur perekonomian dunia yang bersifat eksploitatif, dimana negara maju melakukan eksploitasi terhadap negara dunia ketiga. Akibatnya surplus dari negara-negara dunia ketiga beralih ke negara-negara industri maju, seperti Amerika Serikat dan Inggris (Kuntjoro, 2004: 89).

Pemekaran Kecamatan

Pemekaran Kecamatan adalah pembentukan kecamatan baru dengan cara mengembangkannya dari kecamatan yang telah ada. Pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu bertujuan untuk percepatan pembangunan masyarakat. Pemekaran tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemekaran Kecamatan, yang isinya antara lain berpenduduk > 7.500 jiwa; memiliki luas wilayah > 10 km²; dan memiliki desa/kelurahan > 4 kelurahan.

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian mengenai keadaan status, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang (Daymon: 2002:44). Sedangkan tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk memuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dengan teori-teori yang dioperasionalkan. (Suharto, 1993: 35).

Informan Penelitian

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui secara pasti permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini untuk dilakukan wawancara mendalam. Adapun responden tersebut adalah:

1. Camat Koto Kampar Hulu
1 orang
2. Unit Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar
1 orang
3. Kabag Tapem BPMPD Kabupaten Kampar
1 orang
4. Kasi Pembangunan Kecamatan Koto Kampar Hulu
1 orang
5. Kepala BPD Desa Tanjung
1 orang
6. Tokoh Pemuda dan Tokoh Masyarakat
2 orang

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah analisa data kualitatif, yakni dengan menggunakan model analisis interaktif yang mana penulis terjun secara langsung ke lokasi penelitian dan secara langsung berinteraksi dengan sumber penelitian dengan tujuan mendapatkan informasi seakurat mungkin. Data yang penulis peroleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa secara

kualitatif menurut teori yang digunakan dan disajikan dalam bentuk uraian dan penjelasan mendalam analisis pembangunan infrastruktur di Kecamatan Koto Kampar Hulu.

PEMBAHASAN

Kondisi Infrastruktur Pasca pemekaran di Desa Tanjung

Pada pembahasan ini akan dipaparkan hasil penelitian pada **Tabel III.2**

Data Infrastruktur Desa Tanjung Pasca Pemekaran

No	Infrastruktur	Jenis	Jumlah	Lokasi
1	Transportasi	Aspal/Semenisasi	2	Dusun I dan Dusun II
2	Air Bersih	Air Sumur	3	Dusun I dan Dusun II
3	Jaringan Listrik	PLN	1	Dusun I
4	Pasar	Pasar Rakyat	1	Dusun I
5	Pendidikan	1.SD 2.SMP 3.SMA	1 - -	Dusun I Tidak ada Tidak ada
6	Pemerintahan	Kantor Desa Balai Pertemuan	1 1	Dusun I Dusun I
7	Kesehatan	Puskesmas Pembantu	1	Dusun I
8	Tenaga Medis	1.Dokter 2. Perawat	1 2	- -

Sumber: Data Olahan tahun 2014

Dalam tabel 3.2 dapat dilihat bahwa ada tiga hal krusial yang tidak terdapat dalam desa Tanjung yaitu

daerah pemekaran tentang perkembangan infrastruktur pasca pemekaran. Kecamatan Koto Kampar Hulu merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Tigabelas Koto Kampar pada tahun 2010, dimana Desa Tanjung sebagai Ibukota nya. Desa Tanjung sendiri kemudian juga dibagi menjadi 6 Dusun. Dusun I merupakan pusat desa dan pusat pemerintahan kecamatan.

Sebelum menganalisa dampak pemekaran terhadap infrastruktur Desa Tanjung terlebih dahulu di paparkan data tentang infrastruktur yang ada di desa tersebut sesuai dengan infrastruktur yang ada pada sebelumnya. Adapun data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

ketersediaan jalan raya, jaringan listrik dan tenaga kesehatan berupa dokter desa. Jumlah Dokter yang

hanya 1 orang dan Perawat yang hanya berjumlah 2 orangpun tidak memadai bagi penanganan kesehatan masyarakat Desa Tanjung yang sebanyak 5.713 jiwa berdasarkan hasil BPS 2012.

Analisa Dampak Pemekaran pada Perkembangan Infrastruktur Pra dan Pasca Pemekaran

Kembali ditegaskan oleh penulis, untuk melihat dampak pemekaran terhadap perkembangan infrastruktur di daerah yang mengalami pemekaran terlebih dahulu harus melihat perbandingan yang ada pada bakal wilayah yang akan mekar nantinya sesaat sebelum mengalami pemekaran dengan data terkini yang didapatkan di lapangan.

Tabel III.3.

Rincian APBDes Desa Tanjung

N o	Kategori		Jumlah (Rp)	Rincian	Total
1	Pembangunan Infrastruktur		Rp.335.000.000/tahun	-	Rp.335.000.000
2	Gaji Kepala Desa		Rp. 1,2 Juta/bulan	1 orang	Rp.14.400.000
3	Gaji KAUR		Rp. 900.000/bulan	4 orang	Rp.43.200.000
4	Gaji KADUS		Rp.750.000/bulan	4 orang	Rp.36.000.000
5	Gaji RT/RW		Rp.200.000/bulan	8 orang	Rp.14.400.000
6	Gaji Anggota BPD		Rp.200.000/bulan	9 orang	Rp.21.600.000
7	Insentif LPM		Rp.4.000.000/tahun	-	Rp.4.000.000
8	Linmas Desa		Rp.4.000.000/tahun	-	Rp.4.000.000
9	Pemuda		Rp.4.000.000/tahun	-	Rp.4.000.000
10	PKK		Rp.5.000.000/tahun	-	Rp.5.000.000
11	Peralatan Kantor		Rp.15.000.000/tahun	-	Rp.15.000.000
12	Perjalanan Dinas	Kecamatan	Rp.150.000/perjalanan	-	
		Kabupaten	Rp.200.000/perjalanan	-	

Pada pembahasan ini akan dipaparkan data perbandingan infrastruktur pokok yang ada pada Desa Tanjung pra pemekaran ketika masih berada dalam wilayah administratif Kecamatan Tigabelas Koto Kampar dengan infrastruktur pokok Desa Tanjung setelah mekar menjadi Ibukota Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka sudah seharusnya ada peningkatan yang signifikan dalam perkembangan infrastruktur desa. Anggaran Desa (APBDes) yang tersedia di Desa Tanjung yakni sebesar Rp. 500 Juta diharapkan mampu memberikan manfaat terutama terhadap infrastruktur yang selama ini menjadi kendala di Desa Tanjung, berikut ini adalah tabel rincian APBDes di Desa Tanjung:

Sumber: Kantor Kepala Desa Tanjung Tahun 2014.

Berdasarkan tabel di atas, untuk pembangunan infrastruktur Desa Tanjung, pemerintah desa mengalokasikan dana sebesar Rp. 335 juta. Ini dinilai cukup untuk membenahi masalah infrastruktur di Desa Tanjung yang selama ini menjadi kendala aktivitas warga. Hal tersebut lebih rinci akan dibahas dalam pembahasan berikut.

a. Dampak Pemekaran Terhadap Infrastruktur Transportasi (Jalan)

Sesuai dengan tabel 4.2 tentang perbandingan infrastruktur Desa Tanjung pra dan pasca pemekaran, dapat dilihat sebagai gambaran awal tentang infrastruktur yang tidak mengalami perubahan berarti selama 3 tahun usia pemekaran Kecamatan Koto Kampar Hulu. Hal ini di kemukakan oleh **Yanto Susanto** selaku KAUR Pembangunan Desa Tanjung dalam petikan wawancara berikut

“sudah 3 tahun mekar tapi jalan disini begitu-begitu saja. Desa-desanya di kecamatan lain sudah bagus semua jalannya. Kita masih ketinggalan”.

(wawancara tanggal 21 Januari 2014)

Kembali melihat pada pembahasan sebelumnya, bahwa Desa Tanjung terdiri dari 4 wilayah

dusun, dimana menurut hasil wawancara di atas terdapat fakta bahwa 2 Dusun di desa ini tidak ada jalan aspal dan hanya terdapat jalan semenisasi yang tidak cukup memadai. Hal tersebut menjadi ironi melihat bahwa Desa Tanjung merupakan Ibukota Kecamatan

Dari petikan wawancara diatas dapat dilihat bahwa permasalahan selama 3 tahun tanpa memiliki jalan yang baik dikarenakan tidak adanya anggaran yang memadai oleh pemerintah kabupaten dalam hal pengadaan infrastruktur tersebut. Lebih lanjut lagi bahwa pada kenyataannya wilayah sekitar merupakan jalur provinsi sehingga ketersediaan jalan di desa lainnya merupakan hasil pengadaan oleh pemerintah provinsi.

Ketika membahas pemekaran sebagai potensi dalam mengembangkan daerah merupakan tugas penting dari pemerintahan mandiri untuk menjamin bahwa kebutuhan rakyat di sebuah daerah tersampaikan. Dalam hal pengadaan jalan aspal di Desa Tanjung sebagai desa mandiri maka sudah selayaknya menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk menyuarakannya kepada pemerintah kabupaten melalui mekanisme yang tertuang dalam pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 yang berbunyi:

- 1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan

- pembangunan daerah kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
 - 3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa

b. Pengadaan sarana air bersih

Salah satu fokus perkembangan infrastruktur yang diangkat pada penelitian ini adalah pengadaan infrastruktur air bersih dimana air bersih merupakan syarat mutlak jaminan kesehatan masyarakat sebuah wilayah. Salah satu permasalahan yang terjadi di Desa Tanjung maupun daerah sekitarnya yaitu tidak masuknya sarana air bersih dari PDAM dari rumah kerumah sehingga masyarakat masih memanfaatkan air sumur yang dibuat melalui bantuan PNPM tahun 2010 hingga saat ini.

c. Pengadaan infrastruktur jaringan listrik

Listrik saat ini telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat baik di kota maupun di desa. Jika berkaca pada masyarakat pedesaan pada 15-20 tahun lalu, listrik merupakan barang mewah yang hanya dimiliki oleh kalangan tertentu saja.

Demikian pula dengan masyarakat Desa Tanjung sebagai masyarakat yang telah melek terhadap laju perkembangan jaman

sudah barang tentu menjadikan hal-hal kelistrikan sebagai hal primer dan harus mereka dapatkan terlebih lagi melihat kemajuan zaman yang menuntut masyarakat beradaptasi dari model-model pengelolaan rumah tangga secara tradisional menjadi pengelolaan rumah tangga dengan bantuan teknologi yang memerlukan arus listrik dan kemudian sekali lagi kita melihat ironi yang terjadi untuk wilayah ini dari paparan tabel terdahulu tentang belum adanya jaringan listrik yang masuk ke beberapa dusun setelah 3 tahun umur pemekarannya.

Hal yang lebih memprihatinkan mengingat listrik pada laju jaman saat ini sudah menjadi hal lumrah yang dimiliki oleh setiap keluarga sehingga dengan sendirinya memiliki jaringan listrik dirumah merupakan indikator kesejahteraan sebuah keluarga. Dalam kasus Desa Tanjung, tidak adanya jaringan sampai saat ini mencitrakan Desa Tanjung sebagai daerah tertinggal.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Dampak Pemekaran Terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung

1. Kurangnya Inisiatif Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Urusannya

satu faktor terhambatnya pembangunan infrastruktur pada saat pemekaran adalah pemerintah desa kurang berinisiatif dalam membawa masalah desa yang tidak mampu ditangani secara mandiri oleh pemerintah desa. Dalam kasus jaringan listrik contohnya pemerintah

desa cepat berputus asa dalam upaya untuk mengadakan jaringan listrik ke daerahnya ketika pihak PLN tidak menindaklanjuti lebih jauh masalah jaringan listrik yang ada pada Desa Tanjung. Selain itu lambatnya jaringan listrik masuk ke desa ini justru karena keberatan warga memberikan sedikit tanahnya untuk pemasangan tiang dan kabel PLN.

Kasus pengadaan air bersih pemerintah desa juga mengalami kendala yang serupa dalam pengadaan infrastruktur air bersih dimana seharusnya masalah penting seperti hal diatas seharusnya menjadi hal yang serius untuk dibicarakan terhadap pihak yang mempunyai wewenang lebih besar di daerah. Namun sejauh ini, pembicaraan kearah itu belum pernah terjadi. Artinya, masyarakat Desa Tanjung perlu mengambil inisiatif untuk menyampaikan ini ke kabupaten.

2. Kurangnya Pendapatan Asli Desa

Salah satu faktor yang menjadikan infrastruktur tidak berkembang pasca pemekaran wilayah adalah kurangnya pendapatan asli desa dimana pasar rakyat yang diharapkan menjadi salah satu sumber pemasukan desa tidak beroperasi dikarenakan akses transportasi perdagangan ke wilayah Desa Tanjung tersendat-sendat. Akibatnya banyak pelaku ekonomi yang mengalihkan kegiatan ekonominya ke pasar lain yang aksesnya lebih mudah.

Kurangnya pendapatan asli desa juga membuat Desa Tanjung

cenderung tergantung pada pemerintah kabupaten sementara realitas implikasi politik bergerak kearah yang tidak menguntungkan bagi Desa Tanjung.

3. Pelaksanaan Pemekaran yang Cenderung Dipaksakan

Tidak berkembangnya infrastruktur di Desa Tanjung juga dipengaruhi oleh proses pemekaran kecamatan yang cenderung dipaksakan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pemekaran kecamatan Koto Kampar Hulu dilaksanakan demi mencapai tuntutan oleh sebagian kalangan yang ingin ada pemekaran kecamatan agar mendapatkan jabatan tertentu. Sementara kemampuan tiap desa dan kemampuan sumber daya manusia sebenarnya belum siap untuk dimekarkan. Terbukti selama 3 tahun ini, belum ada pembangunan infrastruktur yang mencerminkan bahwa Desa Tanjung Layak untuk menjadi Ibukota Kecamatan.

Demikianlah hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak pemekaran terhadap pengadaan infrastruktur di Desa Tanjung. Semoga apa yang dipaparkan dapat menjadi masukan positif bagi semua pihak yang terkait.

KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Pemekaran Kecamatan tidak berdampak signifikan bagi Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanjung, dalam hal ini adalah:

- a. infrastruktur jalan yang tidak berubah (tetap rusak sejak pra pemekaran)
 - b. belum adanya penambahan infrastruktur air bersih untuk mengimbangi pertumbuhan konsumsi penduduk
 - c. tidak adanya penambahan jaringan listrik yang masuk ke desa sejak sebelum pemekaran
 - d. pasar rakyat yang terbengkalai sebagai imbas dari rusaknya akses jalan raya ke tempat tersebut.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tersedianya infrastruktur di Desa Tanjung setelah pemekaran kecamatan, dengan kata lain pemekaran tidak berdampak bagi perkembangan infrastruktur antara lain adalah:
 - a. Kurangnya inisiatif pemerintah desa dalam mengelola urusan rumah tangganya
 - b. Kurangnya Pendapatan Asli Desa (PADes)
 - c. Pemekaran yang cenderung dipaksakan

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadu, 1990, *Pendesaan Fokus Pembangunan*, Jakarta, Prisma.
- Bachtiar Effendi, 2002, *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta
- Budiman, A. 1996. *Teori Negara: Negara, Kekuatan dan Ideologi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Christine Daymon, 2002. *Metodologi Riset Kualitatif*. Yogyakarta: Bentang.
- Dharma Setyawan Salam. 2001. *Otonomi Daerah sebagai Kunci Pembangunan*, Surabaya: Mandar Maju.
- Dedy Supriady Brata Kusuma. 2002. *Dasar dan Prinsip Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Fauzi, N. Dkk, 2001, *Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan*, Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Inu Kencana Syafie dkk, 1999, *Teori dan Isu Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ismawan, 2002. *Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah Di Indonesia*. Jakarta Rineka Cipta.
- Kuntjoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Erlangga, Jakarta.
- Miftah Thoha. 1985. *Prinsip Dasar Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Karya Maju.

- Moeljarto, 1987, Politik Pembangunan. *Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Riyadi, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi menggali potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Riyas Rasyid. 1998. *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka .LP3ES.
- Robinson Tarigan, 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Sarundajang, S.H. 1997, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara Sebuah Pengantar, Tinjauan Khusus Pemerintahan Daerah di Indonesia: Perkembangan, Kondisi dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sarundajang, S.H. 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soedjatmoko. 1983. *Dimensi Manusia dalam Pembangunan: Pilihan Karangan*. LP3ES. Jakarta
- Sujamto Suroto. 1991. *Kebijakan Daerah*, Bandung: Cipta Aksara.
- Suharto Bahar.1993. *Pengertian, Fungsi, Format Bimbingan dan Cara Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Suwarsono dan Alvin Y So. 1990. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia; Teori Modernisasi, Dependensi dan Sistem Dunia*, LP3ES.
- Syarifudin, 1997. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung :Mandar Maju
- Teguh Yuwono, 2001, *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, Clogapps Diponogoro University, semarang.
- Tjahyu Supriatna, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, PT. Rineka Cipta Jakarta: 2000
- Wajong Moloeng. 1975. *Desentralisasi di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Jaya.

Sumber Lain:

- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2010 Tentang *Pembentukan Kecamatan*.

